



# SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020  
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 479/SEK/KP.04.6/3/2020  
Lampiran : 2 (Dua) Lembar  
Hal : Permintaan Penghitungan Kebutuhan Jabatan  
Fungsional Pranata Keuangan APBN dan Analisis  
Pengelolaan Keuangan APBN

16 Maret 2020

Yth. Sdr/i

1. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan;
3. Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan;

di –  
Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti Pasal 4 huruf a dan e Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/ Inpassing, dengan ini disampaikan bahwa agar terlaksananya pengangkatan jabatan fungsional di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya melalui mekanisme Penyesuaian/Inpassing, untuk itu diminta kepada Saudara/i agar segera membentuk tim guna menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional di bidang Perbendaharaan meliputi Pranata Keuangan APBN dan Analisis Pengelolaan Keuangan APBN di lingkungan unit kerja Saudara.

Perhitungan kebutuhan jabatan fungsional dimaksud didasarkan pada volume beban kerja yang dikerjakan dalam satu tahun, proyeksi volume pekerjaan dalam rentang 4 tahun mendatang dan jumlah *eksisting* pemangku tugas/ jabatan di bidang perbendaharaan tiap Satuan Kerja masing-masing.

Penghitungan kebutuhan jabatan fungsional di bidang perbendaharaan tersebut dapat diunduh melalui link <http://bit.ly/2TF1keD>. Hasil penghitungan kebutuhan jabatan fungsional tersebut meliputi file kertas kerja perhitungan formasi yang telah diisi (.x/sx), hasil penghitungan kebutuhan jabatan fungsional yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang beserta surat pengantar dari pimpinan satuan kerja yang telah ditandatangani dan distempel (*Scan e-doc*) dan form isian data pemangku jabatan perbendaharaan pada satker. Data tersebut agar *upload* melalui link <http://tiny.cc/jfperbenMARI> \*) atau dikirim melalui e-mail [jfkepegmari@gmail.com](mailto:jfkepegmari@gmail.com) paling lambat hari **Selasa, tanggal 24 Maret 2020**.

Informasi lebih lanjut terkait perhitungan dapat menghubungi Bagian Administrasi Jabatan Fungsional Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, telp. (021) 384 3348 ext 422 / 734 atau KPPN terdekat pada satker wilayah setempat masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung RI,  
  
A.S. Pujoharsoyo

Tembusan :

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung RI;
3. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (Empat) lingkungan Peradilan;
4. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (Empat) lingkungan Peradilan.

Ket : \*) Agar link dapat diakses, maka *user* wajib memiliki dan mengaktifkan akun e-mail *Gmail* di *browser*



**Petunjuk Pengisian Perhitungan Formasi Jabatan Fungsional di Bidang Perbendaharaan**

1. Unduh dokumen kertas kerja perhitungan formasi melalui link <http://bit.ly/2TF1keD> ;
2. Buka dokumen yang telah diunduh, kemudian ketikkan data isian yang tertera pada sheet 'Profil Satker';
3. Setelah data terisi pada sheet profil satker, kemudian melangkah ke sheet berikutnya yaitu "Inputan". Pada sheet inputan, isi jumlah data yang tersedia pada kolom Volume Per Tahun (kolom isian pada warna kuning);
4. Untuk kolom isian pada 'n', menunjukkan jumlah volume kegiatan dalam satu tahun yang telah dikerjakan pada tiap satker, merujuk volume data pada tahun sebelumnya (Tahun 2019). Sedangkan untuk kolom ' n+1 s.d n+4 ', menunjukkan proyeksi/perkiraan jumlah volume kegiatan yang dikerjakan dalam setiap tahunnya selama 4 tahun mendatang.
5. Selanjutnya, pada sheet inputan, isi data yang tersedia pada kolom jumlah pejabat eksisting/proyeksi dengan kolom yang tersedia diperuntukkan bagi PNS/ pejabat struktural pemangku jabatan PPK, PPSPM, BP (Bendahara Penerimaan), BPEN (Bendahara Pengeluaran), BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu), SAI, PPABP pada satker dengan memperhatikan ketentuan jenjang masing-masing dalam jabatan fungsional Perbendaharaan meliputi : Terampil s.d Madya;
6. Untuk setiap jenjang dalam jabatan fungsional, memperhatikan Pangkat/Gol PNS/Pejabat Struktural pemangku jabatan perbendaharaan di satker masing-masing dengan menyesuaikan kriteria jenjang jabatan fungsional yang tersedia dalam kolom isian meliputi: Terampil (Pangkat/Gol: II/c –II/d), Mahir (Pangkat/Gol: III/a–III/b), Penyelia (Pangkat/Gol: III/c–III/d), sedangkan bagi jenjang Pertama (Pangkat/Gol: III/a –III/b), Muda (Pangkat/Gol: III/c –III/d), Madya (Pangkat/Gol: IV/a –IV/c);
7. Untuk jenjang terampil kriteria pendidikan Min. D3, sedangkan untuk jenjang Pertama s.d Madya kriteria pendidikan min. S1;
8. Untuk keterangan di kolom tahun pada baris ' n ' menunjukkan kondisi keadaan eksisting pada tahun 2019 s.d saat ini (tahun 2020), sedangkan n+1 menunjukkan proyeksi/ prediksi jumlah pejabat pada tahun 2021, kemudian n+2 menunjukkan proyeksi/ prediksi jumlah pejabat yang ada pada tahun 2022;
9. Untuk pengisian keadaan jumlah pejabat eksisting memperhatikan kondisi data riil pemangku jabatan perbendaharaan (PPK, PPSPM dsb) pada masing-masing satker, sedangkan untuk keadaan jumlah pejabat proyeksi pada kolom tahun pada n+1, n+2 s.d n+4 merujuk pada prediksi jumlah pemangku jabatan fungsional perbendaharaan yang logis dan rasional berdasarkan isian pada masing-masing jenjang jabatan fungsional yang tersedia pada sheet inputan dengan mempertimbangkan pula jalur karir bagi pemangku jabatan fungsional. Untuk isian pada kolom masing-masing jenjang jabatan fungsional tidak harus selalu diisi dengan jumlah angka yang sama ataupun meningkat dalam setiap tahunnya dikarenakan pemangku jabatan fungsional tidak dimungkinkan naik jenjang jabatan fungsional setingkat lebih tinggi dalam setiap tahunnya;

**Keterangan :**

- Keadaan jumlah pemangku jabatan PPK, PPSPM, dsb pada satker masing-masing yang dibuktikan dengan surat keputusan/ penunjukan dari pejabat yang berwenang;
- Penghitungan kebutuhan jabatan fungsional **hanya dilakukan pada** sheet Inputan yang terdapat dalam kolom volume per tahun dengan rincian kolom n, n+1 s.d n+4 (kolom yang diberi warna kuning) dan kolom pada jumlah pejabat eksisting/proyeksi dengan rincian kolom PPK, PPSPM s.d PPABP;
- Kolom yang diberi warna kuning, tidak harus selalu diisi dengan angka dalam setiap isian pada kolom kosong yang tersedia, melainkan mempertimbangkan sesuai banyaknya jumlah volume kegiatan yang dikerjakan, kebutuhan data riil, proyeksi yang logis dan rasional bagi satker;
- Untuk satker yang melakukan penghitungan formasi, bahwa pengisian pada masing-masing jenjang jabatan fungsional dalam setiap unit kerja tidak diperkenankan diisi lebih tinggi jenjang jabatannya dari pimpinan satkernya;
- Penghitungan kebutuhan jabatan fungsional bidang perbendaharaan perlu memperhatikan kondisi Pangkat/Gol PNS pemangku jabatan PPK, PPSPM dsb di satker masing-masing, agar ketika beralih karir dalam jabatan fungsional tersedia formasi untuk jenjang jabatan fungsional yang dilamar;
- Bagi tim/ operator yang memiliki kendala atau kesulitan dalam melakukan pengisian dan penghitungan kebutuhan jabatan fungsional di bidang perbendaharaan dapat menghubungi *Contact Person PIC* pada Mahkamah Agung RI yang telah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan (0852 2778 5779) atau dapat pula melakukan koordinasi dengan petugas/ Customer Service pada KPPN di Wilayah satker masing-masing/ setempat.

=====

**Contoh Template Isian Data Pemangku Jabatan Perbendaharaan Satker**

Form Isian Data Pemangku Jabatan Perbendaharaan pada Satker.....

Tanggal ..... Maret 2020

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan Saat Ini	Jabatan di Bidang Perbendaharaan

Mengetahui,

....., .....

(Wilayah) (Tanggal)

TTD,

(.....)

Nama Pejabat yang berwenang  
pada unit kerja